

## ABSTRAK

### **ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2009-2014 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2010 TENTANG ANJAL DAN PENGEMIS**

Oleh

**Willi Yandro Evmanda**

Dalam negara Demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Lembaga Perwakilan Rakyat. Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, ia berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu negara atau daerah memiliki kepala daerah segai pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perpanjangan tangan dari rakyat di palemén.

Kompetensi merupakan suatu yang mendasar, karakteristik dari suatu individu yang di hubungkan dengan hasil yang di peroleh dalam suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ini dilihat dari dua indikator, yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Komisi A memberikan pendapat dan argumentasi tentang seberapa besar kompetensi anggota DPRD berdasarkan dua indikator yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku dalam proses pembuatan perda No 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kemampuan kompetensi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan perda tentang anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengkaji dan mendeskripsikan masalah dalam fenomena secara holistik, dengan memfokuskan pada perspektif orang setempat. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang

Sebagai bahan penelitian skripsi ini menggunakan dua orang narasumber sebagai informan untuk mewawancarai agar dapat mengetahui kemampuan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembuatan Perda No.3 tentang anak jalanan.

Dalam proses pengesahan dan pembuatan Perda kita dapat menilai bagaimana Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Dari ke empat Raperda yang disahkan di dalam berita acara hanya Raperda tentang Pembinaan anak jalanan dan gelandangan saja yang tidak mendapatkan kometer-kometer dari beberapa Anggota Dewan saja, itu karena mereka sadar betapa pentingnya Perda No 3. Tahun 2010 ini untuk disahkan dan ini sudah dapat memberikan kesimpulan bahwa anggota dewan Komisi A sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah sosial seperti anak jalanan dan gelandangan di Kota Bandar Lampung.

## **ABSTRACT**

### **ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2009-2014 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2010 TENTANG ANJAL DAN PENGEMIS**

**Oleh**

**Willi Yandro Evmanda**

In the Democratic state supreme authority in the hands of the people and its implementation by an agency of Representatives. As an institution of Representatives, he was functioning as a tool for the interests of society. In this case a country or region has a regional head sebagai leader and Member of the House of Representatives as an extension of the people in palemen

Competence is a fundamental characteristic of an individual which connect with the result that was obtained in a job. The factors that influence competency is seen from the two indicators, namely indicators of technical competencies and behavioral indicators of competence. Members of the Regional Representatives Council (DPRD) Commission A particular expression of an opinion and arguments about how much competence legislators based on two indicators are indicators of technical competencies and behavioral indicators of competence in the process of regulation No 3 of 2010 on the development of street children, vagrants and beggars.

Of the writing of this thesis is to investigate and describe the ability of the competence of the Member of the Regional Representatives Council in the process of establishing regulations concerning street children. This research uses descriptive method, namely to assess and describe the problem in a holistic phenomenon, by focusing on the perspective of local people. Descriptive methods can be interpreted as method in researching the status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought or a class of events in the present

As the material of this thesis research uses two narasumber as an informant for the interview in order to determine the ability of Members of Legislative Assembly in law-making process No.3 dtentang street children.

In the process of legalization and regulation-making we can assess how the competence of Commission A Member of the Regional Representatives Council City of Bandar Lampung. Of the four draft regulation that was passed on in the minutes just draft regulation on the fostering of street children and homeless people are not getting coment of some Council members, it's because they realize how important the Regulation No. 3. Year 2010 was to be ratified and is now able to provide the conclusion that a board member of Commission A already has a good competence in responding to and resolving social problems such as street children and homeless in the city of Bandar Lampung.